

KEBIJAKAN INVESTASI DI KAWASAN TIMOR BARAT**¹Jacoba Daud Niga**¹Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang[¹jakoba@staf.undana.ac.id](mailto:jakoba@staf.undana.ac.id)

ABSTRACT

This research aims to analyze and describe the potential of natural resources in Belu Regency and North Central Timor Regency that are prepared to attract national and international investors. The follow-up to preparing cross-border posts which are then used as border markets located in Motaain, Matemaik, Haekesak/Turiskain and Builalo while in North Central Timor Regency they are located in Haumeniana, Wini and Napan. Investors can invest through border markets in the West Timor region. Socio-economic factors, labor and competition are the main problems. The purpose of the research is to present information about the readiness of the Belu and North Central Timor District Governments regarding investment policies, as well as to provide considerations to local governments at the Provincial and District levels regarding strategic steps to prepare for the entry of foreign investors. The research method used is open sampling technique, and relational sampling. The results show that there are no local regulations in the fields of taxation, labor, especially policies related to foreign workers. The Provincial Minimum Wage becomes the benchmark for the Belu and North Central Timor District Governments. The importance of commitment from local governments in supporting investment in the form of accepting external relations on the promotion of regional potential as well as policies to protect labor. The District Government in West Timor recognizes the importance of foreign investment in advancing the region's economy. The readiness of various consistent legal instruments related to industry and trade in goods and services needs special attention.

Keywords; Investment, Policy, West Timor

A. PENDAHULUAN

Kondisi dan situasi investasi di Kawasan Timor Barat yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan Negara Timor Leste perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar kebijakan investasi dapat berjalan dengan baik untuk mengantisipasi kekurangan pangan. Untuk itu diperlukam kordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program antar kabupaten yang berada diwilayah Timor Barat. Salah satu langkah penting diantaranya melalui kegiatan pengkajian ilmiah untuk menemukan alternatif penyelesaian masalah ekonomi dan sosial. Informasi

yang diperoleh dari kajian ilmiah tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah pusat dan daerah dalam rangka merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi di wilayah Timor Barat.

Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste di bidang lintas batas dan peraturan pasar tradisional yang ditandatangani di Timor Leste pada tanggal 8 Oktober 2002. Penelitian ini dilaksanakan di dua Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, yaitu Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Fokus penelitian ini diarahkan pada masalah kebijakan investasi yang berkaitan dengan faktor resiko suatu investasi. Kategori faktor resiko yang ditelusuri pada penelitian ini adalah resiko sosial ekonomi yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja dan persaingan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara terkait kebijakan investasi, serta memberi pertimbangan kepada pemerintah daerah pada aras Provinsi dan Kabupaten mengenai langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan masuknya penanaman modal asing. Terkait dengan Kebijakan Investasi di kawasan Timor Barat, perlu diperhatikan beberapa hal:

Masalah Keamanan Investasi

Permasalahan yang sering dihadapi dalam meningkatkan investasi di suatu daerah adalah terkait masalah keamanan dan kebijakan investasi. Walaupun sumber daya alam suatu wilayah sangat potensial, namun potensi tersebut belum cukup untuk suatu keputusan investasi, karena faktor lain yang turut menentukan keputusan investasi adalah masalah keamanan investasi.

Keamanan Investasi (Devie, 2004) adalah a security purchased for investment purposes, rather than for resale to customers. Definisi ringkas ini menunjukkan dua kualitas keamanan investasi; Pertama, keamanan yang dihubungkan dengan tujuan investasi; Kedua, keamanan yang tidak dihubungkan langsung dengan kegiatan investasi, tetapi dengan produk yang dapat ditawarkan oleh investor agar kegiatan investasi yang dilaksanakan terlihat tingkat keamanannya. Dalam hubungan dengan makna ke dua, keamanan investasi berhubungan dengan indikator-indikator yang dapat dipasarkan atau dijual dengan harga yang jelas sesuai nilai jualnya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa

terminology keamanan investasi yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah keamanan yang dijaminan oleh pemerintah untuk kegiatan investasi atau dikenal sebagai keamanan tipe satu. Rumusan ini berkaitan dengan indikator kesiapan peraturan dan kebijakan pemerintah.

Keamanan investasi berkaitan dengan faktor resiko yang merupakan bagian dari suatu rencana investasi. Faktor resiko yang menjadi patokan investasi adalah faktor resiko yang dapat diperhitungkan. Ada beberapa aras resiko yang dikenal dalam dunia investasi (Sujianto,2004), yakni resiko pribadi (*personal risk*) yang berkaitan dengan kemampuan kontrol dari investor, resiko perusahaan (*company risk*) yang berkaitan dengan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola hutang serta resiko nasional dan internasional (*national and international risk*) yang berhubungan dengan pasar.

Sesuai dengan wewenang pemerintah diaras Provinsi dan Kabupaten maka penelitian ini berhubungan dengan kategori resiko yang ke empat yaitu resiko nasional berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi yang menjadi kendala dalam investasi.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai konsep keamanan investasi yang dikembangkan, maka variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Resiko sosio ekonomi yang berhubungan dengan tenaga kerja dan persaingan. Sesuai dengan tujuan penelitian metode dan prosedur sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tehnik open sampling, dan relational sampling. Pemilihan individual sampling menggunakan teknik snowbal sampling. Sumber Informasi dalam penelitian ini berasal dari lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), pelaku bisnis, lembaga-lembaga non-Pemerintah dan masyarakat. Data sekunder dikumpulkan dari instansi Pemerintah Daerah terkait sedangkan data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dengan menggunakan *questionnaire tipe open ended question*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara merupakan wilayah yang memiliki perbatasan darat dengan Negara Demokratik Timor Leste. Sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara

Demokratik Timor Leste yang ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2002, telah ditetapkan sejumlah lokasi pintu masuk untuk orang dan barang di ketiga Kabupaten tersebut, yakni Motaain, Matemauk, Turiskain dan Builalo di Kabupaten Belu, Napan, Wini dan Haumeniana di kabupaten Timor Tengah Utara. Sejak ditetapkan sebagai pintu masuk orang dan barang yang juga berfungsi sebagai pasar tradisional perbatasan tersebut, transaksi barang telah berlangsung walaupun masih terdapat sejumlah kendala. Keterbukaan wilayah ini merupakan langkah awal bagi kabupaten di wilayah Republik Indonesia untuk mempersiapkan suatu iklim investasi baik bagi investor lokal, nasional maupun internasional. Peran sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan perdagangan dalam mengembangkan Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara terasa begitu penting sebagai suatu usaha untuk menarik investasi domestik dan investasi asing. Selain itu peran sektor pendukung kegiatan investasi ikut menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya.

Secara khusus akan diuraikan tentang situasi dan kondisi sektor-sektor yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan investasi. Sektor-sektor tersebut terdiri dari 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) Angkatan kerja, 4) Sumber daya alam, 5) perikanan, 6) tanaman pangan dan hortikultura, 7) peternakan, 8) kehutanan, 9) perkebunan, 10) perindustrian dan 11) pariwisata.

Pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan lebih banyak berhubungan dengan pendidikan formal, sedangkan mengenai pendidikan kejuruan atau ketrampilan hampir tidak ada. Ini tidak berarti bahwa ke dua kabupaten ini tidak pernah menghasilkan tenaga kerja terampil dalam bidangnya. Berbagai resiko yang ditempuh oleh pemuka agama untuk ikut memberi warna tersendiri bagi dunia pendidikan di kedua daerah ini walaupun kurang dipublikasi. Untuk menunjang pengembangan ekonomi masa depan tidak saja membutuhkan tenaga terdidik dan terampil didalam berbagai sektor pembangunan tetapi juga penciptaan tenaga-tenaga spesialis dalam bidang yang akan dikembangkan perlu mendapat perhatian dini. Untuk itu demi menopang kegiatan investasi dimasa depan perlu berbagai persiapan pendukung seperti: 1) persiapan tenaga spesialis, 2) pembangunan sekolah-sekolah keterampilan, 3) rekrutmen guru-guru, 4) pembuatan sarana perbengkelan, laboratorium dan sarana keteknikan

Kesehatan

Pada aspek kesehatan, penduduk pedesaan di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara masih berkisar pada jenis penyakit ispa, malaria dan diare, serta penyakit lainnya. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis terus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah setempat.

Angkatan Kerja

Semakin berkembangnya teknologi maka kebutuhan tenaga kerja lebih pada tenaga spesialis pada bidang masing-masing. Demikian pula pada sektor swasta, dengan berkembangnya industri maka dibutuhkan tenaga terampil untuk bidang masing-masing.

Sumber Daya Alam

Kondisi geologi, topografi, dan klimatologi yang bervariasi untuk Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara menjadi peluang untuk pengembangan pada sektor ekonomi, karena mengakibatkan tersedianya berbagai komoditi khas yang dapat dijumpai di kedua wilayah tersebut.

Ketersediaan sumberdaya alam yang spesifik merupakan potensi yang bisa digunakan secara tepat dan berencana akan mampu menggerakkan roda ekonomi ke dua wilayah tersebut.

Perikanan

Kedua Kabupaten ini dikelilingi oleh laut yang menghasilkan berbagai jenis ikan dan memiliki nilai ekonomis baik pada pasaran lokal maupun nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ikan yang terdapat di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara terdiri dari Kakap, ekor kuning, tenggiri, pari, penyu hijau serta berbagai jenis ikan kecil lainnya. Sedangkan untuk perikanan darat, hasil penelitian menunjukkan potensi pengembangan yang lebih cocok adalah ikan bandeng dan udang. Selain ketersediaan potensi laut, daya tarik investasi untuk sektor ini membutuhkan berbagai faktor penunjang, diantaranya, penyediaan infrastruktur jalan ke pelabuhan, bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, pembuatan sistim rantai pendingin, pembuatan sarana tempat penitipan ikan yang memenuhi persyaratan.

Tanaman Pangan dan Holtikultura

Berbagai tanaman pangan yang ada di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara berupa padi-padian, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam satu kali kunjungan pasar dapat diidentifikasi berbagai jenis holtikultura lokal spesifik. Untuk memasarkan holtikultura yang dikatakan lokal spesifik perlu dilakukan beberapa tindakan awal seperti pendataan berbagai jenis holtikultura yang lokal spesifik, penelitian dan publikasi jenis holtikultura, serta pendirian laboratorium pasca panen.

Peternakan

Secara klimatologis Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara merupakan wilayah semiringkai dengan padang penggembalaan yang relatif luas dibandingkan dengan lahan pertanian basah. Padang penggembalaan yang luas ini sangat potensial bagi pengembangan peternakan. Jenis ternak yang ada terdiri dari: kuda, sapi, kerbau, kambing dan babi. Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara pernah mendapat julukan sebagai Gudang ternak”, karena sebagai kabupaten pengekspor ternak besar. Namun julukan gudang ternak tersebut cepat berlalu karena manajemen yang tidak menjamin kelanggengan ekspor ternak khususnya sapi Bali. Untuk mengembalikan julukan tersebut perlu berbagai tindakan terencana seperti penetapan wilayah pertanian dan peternakan, perbaikan mutu dan jumlah pakan ternak serta penentuan strategi ekspor.

Kehutanan

Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara memiliki kebiasaan tebas bakar perladangan berpindah yang akan mengakibatkan terjadinya penggundulan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke dua Kabupaten ini memiliki rencana perluasan kawasan hutan menurut tata guna hutan. Jenis hasil hutan yang bernilai ekonomi dan tercatat sebagai primadona Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara yang perlu dikembalikan antara lain: kayu cendana, mahoni, kayu merah, kayu jati dan jenis pohon kayu putih yang selama ini secara tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku minyak kayu putih. Hasil hutan yang termasuk non kayu yang perlu mendapat perhatian antara lain: sirlak, madu dan sarang burung wallet.

Perkebunan

Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara dikenal sebagai daerah penghasil jambu mete, kelapa, kakao dan kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman jambu mete dan kemiri memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan masyarakat dan PAD Kabupaten. Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tanaman perkebunan membutuhkan berbagai upaya seperti memperkenalkan jenis komoditi yang laku di pasar nasional maupun internasional, perbaikan dan peningkatan mutu pasca panen, penciptaan sistim pemasaran yang menguntungkan masyarakat.

Perindustrian

Sektor perindustrian di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara telah berhasil dengan berbagai produknya; dalam bentuk penjualan hasil tenun Insana dari Timor Tngah Utara dan Gerabah dari Belu Selatan, telah menunjukkan kemampuan ke dua kabupaten ini untuk menawarkan produknya keluar. Namun kemampuan manajerial dan teknis dalam mempertahankan dan menaikkan mutu produk merupakan kendala serius disamping kemampuan marketing. Tetapi dalam konteks investasi sektor ini sangat berperan dimasa depan.

Pariwisata

Letak Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara sangat strategis sebagai tempat transit dan ikut mengembangkan bisnis perhotelan dan rumah makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang promosi dari ke dua Kabupaten ini untuk menarik pariwisata domestik dan mancanegara, sebab lain juga berhubungan dengan belum dikembangkannya berbagai obyek wisata. Untuk memperbiki hal tersebut pemerintah patut mengembangkan secara serius berbagai jenis obyek wisata, yang dapat dikategorikan sebagai: 1) Pariwisata budaya, mempersiapkan berbagai situs purbakala yang tersebar luas, mempromosikan berbagai jenis tarian yang ada sesuai adat dan peristiwa yag ada serta memperkenalkan teknik dan falsafah pembuatan rumah adat, 2) Pariwisata Agama, mempersiapkan informasi serta sarana penunjang bagi peziarah ke berbagai tempat suci; 3) Pariwisata Alam, dengan mempersiapkan paket wisata hutan tropis yang menjadi ciri ke dua Kabupaten; 4) Pariwisata laut, dengan mempromosikan kawasan laut dan teluk yang potensial serta kegiatan pemancingan ikan laut dan air tawar; 5) Agrowisata, dengan

mempromosikan paket wisata pada kegiatan penyulingan minyak atsiri dan alkohol secara tradisional serta pembuatan sagu dari pohon gawang.

Promosi pariwisata membutuhkan berbagai persiapan baik yang harus ditangani oleh Pemerintah, sektor swasta dan terutama persiapan masyarakat secara individu dan kelompok. Hal-hal yang patut diperhatikan dalam upaya pengembangan program wisata antara lain: 1) penetapan resort wisata, 2) penetapan status tanah, 3) penyiapan sarana air bersih dan listrik, 4) pengembangan infrastruktur jalan, 5) pengembangan jasa pos telekomunikasi dan money changer 6) pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, serta penyediaan jasa guide

Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara telah mempunyai pengalaman dalam hubungan dengan adanya pasar di wilayah perbatasan, khususnya dalam pengaturan arus barang dan jasa. Pengaturan arus barang dan jasa pada pasar perbatasan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama dengan pihak Negara Demokrat Timor Leste, khususnya untuk penetapan jenis barang yang tidak kena fiskal. Pemerintah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara sedang mempersiapkan terminal lintas batas untuk kontrol arus barang dan orang, bahkan dilengkapi dengan SPBU dengan tarif dolar untuk kendaraan Negara Demokrat Timor Leste dan tarif rupiah untuk kendaraan Indonesia.

Berkaitan dengan otonomi daerah dimana memberi kesempatan untuk pemerataan pembangunan dan membuka peluang baru bagi kebijakan dibidang ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara dalam kaitannya dengan masalah perbatasan memiliki kewenangan yang terbatas. Masalah arus barang ke Kabupaten lain dipungut retribusi bagi kabupaten yang dilalui. Akibatnya bila suatu barang harus melewati 3 (tiga) kabupaten terkena pajak 3 (tiga) kali. Pemungutan ini dapat berdampak negatif bagi kebijakan investasi. Selain itu pula indeks tingkat kepercayaan yang digolongkan dalam faktor resiko ekonomi adalah kebijakan pajak, larangan atau pembatasan modal asing, serta impor dan perburuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak dan undang-undang tentang pembatasan modal asing adalah wewenang Pemerintah pusat namun permasalahannya pada tahap implementasi. Masalah perburuhan adalah urusan antara perusahaan dengan karyawan. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan juga pemerintah tetap

berupaya agar karyawan tidak dirugikan. Indeks tingkat kepercayaan yang digolongkan dalam faktor kebijakan perburuhan adalah apa yang sudah dibuat oleh eksekutif, legislatif, pengusaha, pelaku pasar, LSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMR ditetapkan oleh provinsi, belum tersedianya Perda yang mengatur tentang tenaga kerja asing.

D. SIMPULAN

Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Barat mengakui pentingnya investasi dari luar terutama investasi asing dalam memajukan roda perekonomian wilayah tersebut. Demikian pula dengan komitmen para pemerintahan daerah kabupaten untuk melayani investasi dari luar. Demikian juga dengan produk informasi terkait investasi, terutama informasi potensi. Oleh karena itu, pihak Pemda dan pelaku bisnis di daerah umumnya masih bersifat menanti peluang. Perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mempersiapkan berbagai perangkat hukum yang konsisten terkait industri dan perdagangan barang dan jasa, seperti retribusi daerah. Lembaga dan manajemen perijinan investasi (satu atap) yang dapat mempermudah birokrasi perijinan investasi dan kordinasi perijinan (jaringan kerja) dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten perlu memperkuat lembaga yang berfungsi sebagai mediator penyelesaian masalah pertanahan dan perburuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, 1999. Tiga Pilar Pengembangan Wilayah, Penerbit BPPT, Jakarta
- Arisandi, P, 2002. Penguatan Bapedalda dan Revitalisasi Hukum Adat, Komponen Amdal di era Otonomi Daerah
- 2004. Daerah dan Iklim Investasi. Kronik Unika Soegijapranata, 19 Maret 2004
- , 2000. Dukungan Pemerintah Daerah bagi Investor
- Devie, AK, 2004, Mengevaluasi Investasi Jangka Panjang. Forum Leader Business
- Jouro, U, 2003. Insentif Pajak. Publikasi CIDES.
- Sujianto, R. 2004. Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah berlomba Tarik Investor. Penerbit PT. Jumalindo Aksara Aksara Grafika

Usman, S. 2001. Laporan Penelitian Otonomi Daerah dan Iklim Usaha

Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Demokrat Timor Leste di Bidang Lintas Batas dan Peraturan Pasa